

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)

1. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pembiayaan bermasalah terjadi apabila adanya ketidakepatan waktu dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Yang tergolong pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.¹

Batas aman dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebesar 5%, jika bank memiliki rasio *Non Performing Financing* (NPF) lebih dari 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dengan adanya pembiayaan bermasalah, maka bank harus menyediakan biaya pencadangan, yaitu penyisihan penghapusan aktiva (PPA). Pembentukan cadangan umum PPA untuk aktiva produktif ditetapkan paling rendah 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar.²

Pembentukan cadangan khusus PPA ditetapkan paling rendah sebesar:

- a. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan agunan.

¹ Ibid, hlm.89

² Ibid, hlm. 90

- b. 15% dari aktiva produktif dan aktiva non produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- c. 50% dari aktiva produktif dan aktiva non produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan.
- d. 100% dari aktiva produktif dan aktiva non produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan.³

2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dibagi menjadi dua yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Diantara faktor-faktor berikut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa yaitu:

- 1) lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan,
- 2) lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran,
- 3) kebijakan piutang yang kurang tepat,
- 4) penempatan berlebihan pada aktiva tetap,
- 5) permodalan yang tidak cukup.⁴

b. Faktor Eksternal

³ Ibid, hlm. 90.

⁴ Faturrahman Jamil, *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm 73

Merupakan faktor-faktor yang berada diluar kuasa manajemen perusahaan seperti:

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya
- 2) Melakukan side streaming penggunaan dana
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru
- 5) Adanya kebijakan pemerintah, peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. Hal tersebut memang berada diluar kuasa manajer ataupun pimpinan namun bukan berarti menghilangkan rasa tanggung jawab bersama dalam memberikan bantuan ataupun solusi kepada nasabah.⁵

3. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kegiatan operasional di dalam perbankan itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat melalui rasio keuangan sebagai indikator kesehatan serta sebagai alat analisis untuk memprediksi keuntungan yang akan dihasilkan. Faktor eksternal meliputi faktor makroekonomi yang terbentuk atas kejadian

⁵ Ibid, hlm 73

moneter dan kebijakan fiscal secara makro oleh pemerintah negara. Secara dimensi internal, NPF perbankan syariah dapat dianalisis dengan pencapaian yang telah diraih dengan melihat rasio keuntungan berdasarkan.⁶

Beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung rasio (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana dari sumber lain. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.⁷

Modal merupakan faktor penting bagi bank untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi. Bank yang memiliki rasio kecukupan modal yang lebih tinggi cenderung memiliki pengelolaan yang baik. Dengan memiliki kecukupan modal bank, pembiayaan bermasalah pada bank juga akan berkurang, karena risiko yang terjadi sebelumnya sudah diperkirakan, potensi kerugian yang dialami oleh bank akan di tanggulangi jika bank memiliki rasio kecukupan modal yang baik.⁸

⁶ Veithzal Rifai dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 394.

⁷ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi 2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.121

⁸ Sigit Arie Wibow dan Wahyu Saputra, "Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, hlm. 101-102, Juni 2017.

b. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to deposit ratio atau FDR dapat menggambarkan tingkat likuiditas perbankan. Jika Bank memiliki likuiditas yang tinggi, pembiayaan bermasalah yang terjadi akan dengan mudah ditanggulangi, karena bank akan dapat dengan mudah mencairkan aset yang mereka miliki. Sebagaimana bank walaupun memiliki pembiayaan bermasalah yang tinggi akan tetapi bank memiliki rasio likuiditas yang diatas rata-rata sehingga dapat teratasi. Jika suatu bank memiliki *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang sehat (sesuai ketentuan Bank Indonesia) menunjukkan dari jumlah dana yang tersedia dapat digunakan secara maksimal dalam bentuk kredit sebagai aset yang dianggap produktif.⁹

Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Gross Domestic Products (GDP)*

Salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu.¹⁰ Istilah yang sering digunakan untuk pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Products (GDP)*. *Gross Domestic Products (GDP)* merupakan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan

⁹ Ibid, hlm.101

¹⁰ Mankiw, N. G, *Macroeconomics 6th Edition*.Terjemahan oleh Wibi Hardani, Devri Barnadi & Suryadi Saat, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.17

menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut.¹¹ Ketika *Gross Domestic Products* (GDP) meningkat secara teori terjadi peningkatan transaksi ekonomi, dunia bisnis meningkat sehingga NPF mengalami penurunan.¹²

b. Inflasi

Pada umumnya inflasi menyebabkan harga-harga barang meningkat, hal ini berkemungkinan berdampak terhadap perekonomian yang menjadi lesu. Karena daya beli masyarakat akan menurun serta bisnis pun akan melemah. Debitur sebagai peminjam dana akan cenderung kesulitan mengembalikan dana kepada Bank. Pada saat terjadinya inflasi beban tanggungan debitur akan semakin tinggi akan tetapi pendapatan secara riil cenderung tetap atau bahkan menurun. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.¹³

4. Macam-macam Kualitas Pembiayaan

Penggolongan ini didasarkan pada kemampuan membayar anggota terhadap angsuran, antara lain:

- a. Lancar yakni dikatakan demikian apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu

¹¹ Rahardja dan Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 12

¹² Nasution, E., Mustafa, dan Wiliansih, "Profit Sharing dan Moral Hazard dalam Penyaluran DPK Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol VIII, No.02105-129. 2007

¹³ Sigit Arie Wibow dan Wahyu Saputra, "Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, hlm. 100, Juni 2017.

menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

- b. Dalam perhatian khusus yakni apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari.
- c. Kurang lancar yakni jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- d. Diragukan yakni jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari (9 bulan).
- e. Macet yakni apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.¹⁴

Penggolongan pembiayaan bermasalah seperti yang dikemukakan diatas dapat membuat bank lebih cekatan dalam pengambilan keputusan, agar bank setidaknya terselamatkan dari pembiayaan bermasalah.

5. Dampak Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)

Sebagai salah satu lembaga keuangan, BPRS mengandalkan pembiayaan sebagai sumber pemasukan udalam membiayai operasionalnya. Dana yang digunakan untuk pembiayaan merupakan dana yang berasal dari nasabah (surplus dana), sehingga ada tanggung jawab bagi BPRS untuk mengembalikan dana tersebut kembali. Namun jika tingkat *Non Performing*

¹⁴ Faturrahman Jamil, *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm 69-71

Financing (NPF) pada BPRS tinggi maka akan berdampak pada menurunnya bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana.

Beberapa dampak yang akan dirasakan oleh berbagai pihak antara lain:¹⁵

- a. Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan *income* dari pembiayaan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas.
- b. Rasio kualitas produktif atau yang lebih dikenal dengan *Bad Debt Ratio* (BDR) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi memburuk.
- c. BPRS harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif. Hal tersebut pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal dan akan mempengaruhi CAR.
- d. *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan.

Pembiayaan macet yang cukup besar dalam suatu lembaga keuangan membawa dampak yang cukup luas yaitu secara:

- a. Makro, kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan baru menjadi berkurang sehingga menutup kemungkinan calon debitur baru untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan.
- b. Mikro, merugikan perkembangan usaha dan kesehatan lembaga keuangan, keadaan ini mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan sehingga

¹⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 31

kemungkinan terjadinya suatu lembaga keuangan tidak dapat memenuhi kewajiban segera, serta akan mempengaruhi keadaan permodalan.

6. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)

Untuk mengurangi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* BPRS dapat melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu upaya yang dilakukan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁶

Penjadwalan kembali adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembayaran kewajiban nasabah atau memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan. Persyaratan kembali adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah kepada pihak lembaga keuangan. Penataan kembali adalah perubahan persyaratan pembiayaan dengan melakukan konversi pembiayaan.

Rumus perhitungan NPF sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

¹⁶ A. Wangsawidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.447

B. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

1. Definisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan / aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank akan mampu membiayai kegiatan operasional. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar CAR yang baik adalah sekitar 8%.¹⁷

Modal salah satu faktor terpenting dalam kegiatan pengembangan sebuah usaha untuk menampung segala resiko kerugian yang akan terjadi. Modal berfungsi untuk membiayai pelaksanaan usaha sebagai instrumen untuk mencegah rasio dan sebagai alat untuk ekspansi suatu usaha. Sedangkan menurut Bank Indonesia, penelitian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal Bank dalam mengcover eksposur saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa yang akan datang.

Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber

¹⁷ Rizal Nur Firdaus, "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *El-Dinar*, Vol. 3, No. 1, Januari 2015.

dari dua hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Modal termasuk faktor penting dalam pengembangan suatu usaha bisnis dan menampung semua resiko kerugian. Besar kecilnya suatu modal dalam bank dapat mempengaruhi pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya dan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk masyarakat meminjam) terhadap kinerja bank. Penggunaan modal bank juga dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan bank guna menunjang kegiatan operasi bank, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha.

Rumus perhitungan CAR adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko)}} \times 100\%$$

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal sebuah bank. Menurut Muhammad, modal disini meliputi:

- a. Modal disetor maupun dana setoran modal
- b. Cadangan umum
- c. Cadangan lainnya

- d. Sisa laba tahun lalu
- e. Laba tahun berjalan

Ketentuan mengenai batas minimum CAR tersebut dari waktu ke waktu telah diubah oleh Bank Indonesia, antara lain:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 MEI 1993, bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Ratio (ATMR).
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjadi sebesar 4% dari ATMR. Penurunan ini dikarenakan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada saat itu.¹⁸

C. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing (NPF)*.

1. Definisi *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.¹⁹ Seberapa besar pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS kepada masyarakat atau nasabah, BPRS harus mampu

¹⁸ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*,(Jakarta: Bumi Aksara,2010) hlm 785

¹⁹ Rina Destiana, “Determinan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia”, *JRKA Volume 4 Issue 1*, Februari 2018 53-63

mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. FDR diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima. FDR menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu lumayan panjang.²⁰

Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah BPRS dapat dilihat dari rasio FDR. BPRS dikatakan likuid apabila mampu memenuhi seluruh kewajiban hutang dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa ada penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh lebih dari 110%. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut, menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Semakin tinggi rasio FDR mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat.

Rumus untuk mencari nilai FDR adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

2. Penyaluran Dana

²⁰ Sri Wahyuni Asnani, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal TEKUN/Volume V No 02*, September 2014:264:280

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga, sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki ataupun bagi hasil. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain: pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan dengan akad pelengkap.²¹

Pada kategori jual beli dan sewa, besaran keuntungan bank ditentukan dari awal dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Sedangkan pada prinsip bagi hasil, keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.

3. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana

Setiap proses penyaluran dana harus mengacu pada pedoman yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan umum mengurangi resiko penyaluran dana yang berakibat pada penurunan

²¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 97

tingkat keuntungan bank. Kebijakan pokok dalam penyaluran dana meliputi:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian melalui prosedur penyaluran dana yang sehat, penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap plafondering, prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah.
- b. Kebijakan penyaluran dana pihak terkait.
- c. Pemetaan sektor ekonomi dan segmen pasar.
- d. Penyaluran dana yang perlu dihindari meliputi penyaluran dana yang bertentangan dengan syariah, untuk tujuan spekulasi, kepada nasabah yang bermasalah dan lainnya yang dapat merugikan bank nantinya.²²

D. *Gross Domestic Product (GDP)*

Gross Domestic Product (GDP) merupakan salah faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing (NPF)*.

1. Definisi *Gross Domestic Product (GDP)*

Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) tahunan suatu negara adalah nilai total sebuah barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun di negara tersebut. *Gross Domestic Product (GDP)* hanya menghitung barang jadi atau barang final dan jasa final, dan tidak termasuk nilai barang setengah jadi. *Gross Domestic Product (GDP)* dipakai sebagai

²² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 95-101

media atau indikator yang baik untuk kehidupan masyarakat. GDP merupakan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut.²³

Metode yang sering digunakan adalah metode pengeluaran/penggunaan, dalam metode ini *Gross Domestic Bruto* (GDP) dibedakan menjadi empat komponen, yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G) dan ekspor neto (NX).²⁴ *Gross Domestic Bruto* (GDP) dapat dirumuskan menjadi:

$$\text{GDP} = C + I + G (X-M)$$

Keterangan:

C: Pengeluaran konsumsi barang dan jasa pribadi

I: Investasi

G: Pengeluaran untuk belanja pemerintah baik dari konsumsi dan investasi

X: Mewakili ekspor

M: Mewakili impor

²³ Rahardja dan Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 12

²⁴ Mankiw, N. G, *Macroeconomics 6th Edition*. Terjemahan oleh Wibi Hardani, Devri Barnadi & Suryadi Saat,....., hlm.9

2. Metode Penghitungan *Gross Domestic Product* (GDP)

Ada tiga metode untuk menghitung GDP, yaitu:²⁵

a. Metode produksi (*Output Approach*)

Menurut metode ini, GDP adalah total output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara menghitungnya adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Dalam perhitungan GDP dengan metode produksi yang dijumlahkan adalah nilai tambah masing-masing sektor. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input.

b. Metode pendapatan (*Income Approach*)

Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Jadi untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang. Jumlah tenaga kerja, barang modal dan uang tidak akan berarti tanpa adanya kemampuan *entrepreneur*. Kemampuan *entrepreneur* adalah kemampuan dan keberanian mengombinasikan tenaga kerja, barang modal dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan yang memiliki kemampuan *entrepreneur* disebut pengusaha.

²⁵ Rahardja dan Manurung, *Teori Ekonomi Makro.....*, hlm. 16-21

Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Dalam definisi ini PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Metode pengeluaran

Menurut metode pengeluaran nilai GDP merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian: (a) Konsumsi rumah tangga (*Household Consumption*). Pengeluaran rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis pakai dalam tempo setahun atau kurang maupun barang yang dapat dipakai lebih setahun atau barang tahan lama; (b) Konsumsi pemerintah (*Government Consumption*). Konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir. Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah; (c) Pengeluaran Investasi (*Investment Expenditure*). Pengeluaran investasi merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Termasuk dalam pengeluaran investasi adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Untuk

mengetahui berapa potensi produksi, akan lebih akurat bila yang dihitung adalah investasi neto. Perhitungan pengeluaran investasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pengeluaran lebih mempertimbangkan barang-barang modal yang baru, barang-barang modal tersebut merupakan output baru; (d) Ekspor Neto (*Net Export*). Ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia). Nilai GDP berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut:

$$GDP = C + G + I + (X - I)$$

3. Macam-macam GDP

Gross Domestic Product (GDP) dibagi menjadi dua yakni *Gross Domestic Product* (GDP) riil dan *Gross Domestic Product* (GDP) nominal. *Gross Domestic Product* (GDP) adalah ukuran paling luas yang dapat menggambarkan keseluruhan kondisi perekonomian. Seringkali para ekonom menggunakan *Gross Domestic Product* (GDP) riil untuk dapat menggambarkan kemakmuran ekonomi. Hal tersebut dikarenakan untuk mengukur kemakmuran ekonomi yang lebih baik akan menghitung output barang dan jasa perekonomian dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan harga. *Gross Domestic Product* (GDP) riil juga digunakan

untuk mengukur fluktuasi ekonomi jangka pendek pada aktivitas ekonomi.²⁶

E. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

1. Definisi Inflasi

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya (Sumber: Bank Indonesia.com). Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara riil pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli pasar sebesar 5%.²⁷

Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter, karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Kenaikan harga tersebut dimaksudkan

²⁶ Mankiw, N. G, *Macroeconomics 6th Edition*. Terjemahan oleh Wibi Hardani, Devri Barnadi & Suryadi Saat,....., hlm.12

²⁷ Iskandar Putong, *Economics, Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 427

bukan terjadi sesaat. Dari pengertian tersebut, maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi. Misalnya harga barang-barang naik menjelang lebaran atau libur lainnya. Karena ketika lebaran usai harga barang kembali ke kondisi semula, maka harga seperti itu tidak dianggap sebagai inflasi. Inflasi juga berkaitan dengan harga secara umum, artinya kenaikan harga suatu jenis barang maupun jasa juga tidak termasuk inflasi.

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjualbelikan di pasar dengan masing-masing tingkat harga. Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang di indeks. Angka indeks yang dikumpulkan memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai indeks harga konsumen. Berdasarkan indeks harga konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

2. Teori Inflasi

Paling tidak ada empat teori tentang inflasi yang menjadi patokan penyebab dan pemberian solusi ketika terjadi inflasi. Keempat teori

tersebut diantaranya adalah teori kuantitas, teori keynes, teori strukturalis, dan mark up model.²⁸

a) Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah pertama, bahwa inflasi itu hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang.

b) Teori Keynes

Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes bahwa ini terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan agresif masyarakat.

c) Teori Strukturalis.

Teori ini biasa disebut dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor.

²⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2008), hlm 135

d) Mark-up Model

Dalam teori ini dasar pemikirannya ditentukan oleh dua komponen yakni *cost of production* dan *profit margin*. Jadi apabila ada kenaikan antara kedua komponen maka harga jual komoditi di pasar juga akan meningkat.

3. Penyebab Inflasi

Dalam teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan oleh penambahan jumlah uang beredar dan ada 3 sebab terjadinya inflasi, diantaranya:

c. Inflasi tarikan permintaan (*Demand-pull Inflation*)

Inflasi tarikan permintaan ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*), sedangkan produksi-produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan penuh.

d. Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*)

Inflasi ini bersumber dari masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang diakibatkan kenaikan biaya produksi. Pertambahan biaya produksi mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka harus mengambil resiko yang akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksinya. Inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika pengangguran sangat rendah.

e. Inflasi di impor (*imported inflation*)

Inflasi ini muncul akibat meningkatnya harga barang-barang impor. Apalagi barang tersebut mempunyai peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Contohnya minyak bumi.²⁹

Secara umum penyebab terjadinya inflasi menurut ekonomi Islam seperti yang dikemukakan oleh al-Maqrizi adalah:

a. *Natural Inflation*

Natural Inflation yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa untuk mencegahnya. Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif.

Ketika bencana alam terjadi pada berbagai bahan makanan, dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen sehingga persediaan barang-barang kebutuhan tersebut mengalami penurunan dan terjadi kelangkaan. Di pihak lain, karena barang-barang itu sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap barang-barang mengalami peningkatan. Harga-harga melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Akibatnya, kegiatan ekonomi mengalami kemacetan bahkan berhenti sama sekali yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian. Keadaan ini memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar memerhatikan mereka. Untuk

²⁹ Imammudin Yuliani, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: PT. Macana Jaya Cemerlang, 2008), hlm. 75-76

menanggulangi bencana ini, pemerintah mengeluarkan dana besar yang mengakibatkan perbendaharaan negara menjadi berkurang secara drastic atau defisit anggaran.³⁰

b. *Human Error Inflation*

Human Error Inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Inflasi yang disebabkan oleh *human error inflation* terjadi karena:

1) Korupsi dan buruknya administrasi

Pengangkatan para pejabat yang berdasarkan suap, nepotisme, dan bukan karena kapabilitas akan menempatkan orang-orang pada berbagai jabatan penting dan terhormat yang tidak mempunyai kredibilitas. Mereka yang mempunyai mental seperti ini, rela menggadaikan seluruh harta milik untuk meraih jabatan. Kondisi ini juga berpengaruh ketika mereka berkuasa, para pejabat tersebut akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk menutupi kebutuhan finansial pribadi, maupun keluarga atau demi kemewahan hidup. Akibatnya, akan terjadi penurunan drastic terhadap penerimaan dan pendapatan negara.

2) Pajak yang tinggi

³⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 298-299

Akibat dari banyaknya pejabat pemerintahan yang bermental korup, pengeluaran negara mengalami peningkatan secara drastic adalah sebagai kompensasi mereka menerapkan sistem perpajakan tinggi dan menerapkan berbagai jenis pajak. Efek yang ditimbulkan oleh pajak berlebihan pada perekonomian hamper sama dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi dan buruknya administrasi, yakni *efficiency loss* atau *dead weigh loss*. Konsekuensinya biaya-biaya produksi meningkat yang berimplikasi pada kenaikan harga barang produksi.

3) Peredaran uang berlebihan

Ketika terjadi defisit anggaran baik sebagai akibat dari kemacetan ekonomi, maupun perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara, pemerintah melakukan percetakan uangh fulus secara besar-besaran. Menurut al-Maqrizi, percetakan uang yang berlebihan akan mengakibatkan naiknya tingkat harga. Menurunnya nilai mata uang secara drastis, akibatnya uang tidak lagi bernilai.³¹

4. Macam-macam Inflasi

Inflasi dalam ilmu ekonomi konvensional dapat digolongkan dengan beberapa cara:

a. Inflasi digolongkan menurut besarnya, yaitu:

1) Inflasi ringan atau *low inflation*

³¹ Ibid, hlm. 301-302

Inflasi ringan atau *low inflation* yang disebut juga dengan inflasi satu digit (*single digit inflation*), yaitu inflasi dibawah 10% per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4% dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Inflasi ini masih dianggap normal. Dalam rentang inflasi ini orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uang.³²

2) Inflasi sedang atau *galloping inflation* atau *double digit* bahkan *triple digit inflation*

Inflasi sedang atau *galloping inflation* atau *double digit* bahkan *triple digit inflation* yakni inflasi antara 20% sampai 200% pertahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintah lemah, perang, revolusi, dan kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia sementara uang berlimpah sehingga orang tidak percaya pada uang. Pada saat seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk asset-asset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan mau memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang tinggi.

3) *Hyperinflation*

³² Ibid, hlm. 304

Hyperinflation yaitu inflasi di atas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya pada uang. Lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang, seperti emas, tanah, dan bangunan karena barang-barang jenis ini kenaikan harganya setara dengan inflasi. Inflasi ini muncul sebagai akibat dari: munculnya kehancuran social dan runtuhnya perekonomian, ketidakmampuan pemerintah untuk mengamankan situasi serta kehilangan kekuasaan terhadap rakyat, terjadinya perang yang menghancurkan.

b. Berdasarkan sumber inflasi, inflasi terdiri dari:

1) Inflasi tarikan permintaan (*Demand-pull Inflation*)

Inflasi tarikan permintaan ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*), sedangkan produksi-produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan penuh.

2) Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*)

Inflasi ini bersumber dari masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang diakibatkan kenaikan biaya produksi. Pertambahan biaya produksi mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka harus mengambil resiko yang akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang

yang diproduksinya. Inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika pengangguran sangat rendah.³³

c. Berdasarkan asal inflasi, inflasi ini dapat dikategorikan kepada:

1) *Domestic inflation*

Domestic inflation yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Misalnya, permintaan meningkat untuk barang tertentu, maka terjadi *demand full inflation* yang berasal dari dalam negeri. Atau terjadi kenaikan harga faktor produksi yang diimpor, maka terjadi *cost push inflation* yang bersumber dari luar negeri atau *import cost push inflation*.

2) *Foreign* atau *imported inflation*

Foreign atau *imported inflation* yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Misalnya, terjadi lonjakan permintaan ekspor secara terus-menerus, maka terjadi *demand full inflation* yang berasal dari luar negeri. Atau terjadi kenaikan harga faktor produksi yang diimpor, maka terjadi *cost push inflation* yang bersumber dari luar negeri.

b. Berdasarkan harapan masyarakat, inflasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

³³ Ibid, hlm. 305-306

1) *Expected Inflation*

Expected inflation yaitu besar inflasi yang diharapkan atau diperkirakan akan terjadi. Misalnya, bila terjadi inflasi dari tahun 2001 sampai 2006 konstan 6%. Kemudian, akan ditanya berapa perkiraan mengenai besarnya inflasi tahun 2007 maka tentunya akan dijawab 6%.

2) *Unexpected Inflation*

Unexpected Inflation yaitu inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi. Misalnya, diperkirakan inflasi tahun 2007 sebesar 6% kemungkinan besar inflasi tahun 2007 menyimpang dari 6%. Penyimpangan tersebut merupakan *Unexpected Inflation*.³⁴

F. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Undang-Undang (UU) nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. sedangkan pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum disebutkan pengertian dari

³⁴ Ibid, hlm. 306

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁵

2. Tujuan Didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di bawah ini disampaikan tujuan-tujuan tersebut beberapa sumber hanya menyebutkan butir-butirnya saja. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah, yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Beberapa tujuan didirikannya BPRS adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran BPRS bisa digunakan sebagai sumber permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat golongan ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Membina *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai. Hal ini mengandung makna bahwa dalam BPRS ditumbuhkan nilai *ta'awun* (saling membantu) antara pemilik modal dengan pengelola. Dengan saling membantu maka akan tumbuh kebersamaan antara bank

³⁵ Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.3

dengan ansabah yang merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan *ukhuwah islamiyah*. Melalui kebersamaan tersebut usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal yang diberikan oleh BPRS bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita baik lokal maupun nasional.

Untuk mencapai tujuan operasionalnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut diperlukan strategi operasional. Pertama, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. Kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. Terakhir, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. namun demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah diatur dalam pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- 3) Pembiayaan akad *qardh*.
- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
- 5) Pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah*.

c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan UUS.

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.³⁶

Adapun beberapa larangan dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.³⁷

4. Perbedaan BPRS dengan BPR

Sebelum lahirnya BPRS di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam

³⁶ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 53-54.

³⁷ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 200

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR konvensional dan BPRS. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Akad dan aspek legalitas. BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- b. Adanya Dewan pengawas Syariah dalam struktur organisasi BPRS yang bertujuan untuk mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
- e. Praktik operasional BPRS, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

G. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan Rina Destianan bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang menjadi penyebab NPF. Penelitian tersebut

³⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2002), hlm.56

menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa likuiditas, efisiensi, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah sedangkan permodalan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitian yang dilakukan Rina dengan penelitian ini adalah penggunaan inflasi sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel internal yaitu likuiditas dan efisiensi.³⁹

Dinar Alfian Akbar (2016)⁴⁰, dalam penelitiannya yang berjudul “Inflasi, GDP, CAR dan FDR terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014”. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah, untuk menguji pengaruh GDP terhadap pembiayaan bermasalah, untuk menguji pengaruh CAR terhadap pembiayaan bermasalah, untuk menguji pengaruh FDR terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014. Hasil inflasi tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF); *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF); *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF); *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*; variabel inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), CAR (*Capital Adequacy Ratio*) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Non Performing*

³⁹ Rina Destiana, “Determinan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia”, *JRKA Volume 4 Issue 1*, Februari 2018 53-63

⁴⁰ Dinar Alfian Akbar, Inflasi, GDP, CAR dan FDR terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014, *I-Economic Vol.2.No.2*, 2016.

Financing (NPF). Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel independent (X) dan variabel dependen (Y). Pada penelitian Dinar variabel independent inflasi (X1), GDP (X2), CAR (X3), FDR (X4), dan variabel dependen (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel independent FDR (X1), CAR (X2), GDP (X3), Inflasi (X4) dan variabel dependen (Y) adalah *Non Performing Financing* studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia periode 2014-2018.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati dan Syafrildha Bimo. Tujuan penelitian ini sama seperti penelitian Rizal Nur Firdaus dan menggunakan metode evIEWS 9. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negative terhadap NPF dan BI rate serta BOPO berpengaruh positif terhadap NPF. Pada penelitian yang dilakukan Rindang dan Syafrildha sama menggunakan obyek penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu BPRS di Indonesia. Perbedaan terletak pada variabel yang digunakan pada yaitu variabel BOPO, Bi Rate, tingkat pengangguran, dan PDRB dimana keempat variabel tersebut tidak digunakan pada penelitian ini.⁴¹

Penelitian yang dilakukan Haqiqi Rafsanjani Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode VECM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel makroekonomi berpengaruh terhadap pembiayaan

⁴¹ Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati dan Syafridhal Bimo, "Analisis Pengaruh Faktor Internal BANK dan Eksternal Terhadap NPF pada BPRS di Inonesia", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol.5 No 1, 2016.

bermasalah. Penelitian Haqiqi dengan penelitian ini sama-sama meneliti faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia. Namun metode yang digunakan Haqiqi berbeda dengan metode yang akan digunakan pada penelitian ini.⁴²

Faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada bank umum syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Asnaini bertujuan untuk menguji faktor apa saja yang mempengaruhi NPF. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa GDP, FDR, dan SBIS berpengaruh positif terhadap NPF sedangkan Inflasi dan CAR memberikan pengaruh negative terhadap NPF. Persamaan penelitian Sri Wahyuni dengan penelitian ini tertelak pada beberapa variabel yang digunakan yaitu CAR dan GDP. Sedangkan perbedaannya pada obyek yang diteliti pada penelitian Sri Wahyuni meneliti Bank Umum Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan obyek BPRS.⁴³

Iman Firmansyah melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF dan GDP serta inflasi menunjukkan pengaruh negative terhadap NPF. Obyek

⁴² Haqiqi Rafsanjani, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi NPF: Studi kasus pada BANK dan BPRS di Indonesia", *Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah VOL 3, No. 1, 2018*.

⁴³ Sri Wahyuni Asnani, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal TEKUN/Volume V, No. 02, September 2014:264-280*

penelitian yang digunakan sama dengan penelitian ini yaitu BPRS di Indonesia. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel yang digunakan.⁴⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Afrika dan Dr. Maesyaroh, M.A. metode diskriptif dipilih untuk menyelesaikan penelitian ini. Faktor-faktor penyebab munculnya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Margarizki Bahagia ialah disebabkan oleh faktor eksternal yaitu penurunan usaha nasabah, manajemen keuangan nasabah yang kurang baik serta adanya bencana alam atau *force majeure*, nasabah pembiayaan yang bersangkutan beranggapan bahwa memenuhi kebutuhan hidup dikala situasi yang sulit dan muncul di saat yang tidak tepat tersebut lebih penting dibandingkan kewajiban membayar kewajiban pembiayaan.⁴⁵

Ajeng Kurnia Rahmawati Ningrum (2017)⁴⁶, dengan judul “Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis *Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia*. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia mempunyai fluktuasi sangat tinggi. Adapun beberapa faktor yang dianalisis dalam mempengaruhi *Non Performing Financing* adalah: faktor

⁴⁴ Imam Firmasyah, Faktor penyebab terjadinya pembiayaan rakyat syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 8 No 2, 2014*

⁴⁵ Siti Nur Afrika dan Maesyaroh, *Analisis pembiayaan bermasalah dan upaya penanganannya pada PT. BPRS margarizki bahagia Yogyakarta (studi pendekatan sosiologi interaksi simbolik)*, (Yogyakarta: Skripsi, 2018) Diakses tanggal 04 November 2019 pukul 20.45

⁴⁶ Ajeng Kurnia Rahmawati Ningrum, *Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2016*, (Jakarta: Skripsi tidak Dipublikasikan, 2017) Diakses tanggal 30 Desember 2020 pukul 13.00 WIB

eksternal (Kurs dan Inflasi) dan faktor internal *Capital Adequancy Ratio* (CAR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan beberapa kriteria, yaitu (a) Bank Umum Syariah tersebut terdaftar di Bank Indonesia dan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (b) Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan kuartalan selama periode 2010-2016, (c) Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurs dan Biaya Operasional terhadap Pembiayaan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Sedangkan, inflasi dan *Capital Adequancy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel independent (X) dan variabel dependen (Y). Pada skripsi Ajeng variabel independent Kurs (X1), Inflasi (X2), CAR (X3), BOPO (X4) dan variabel dependen (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah Periode 2010-2016. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel independent FDR (X1), CAR (X2), Inflasi (X3), dan variabel dependen (Y) adalah *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2011-2018.

Vikky Riannasari melakukan penelitian dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh equivalent rate dan tingkat keuntungan terhadap NPF (*Non Performing Financing*) berdasarkan golongan pembiayaan pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) di Indonesia, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh CAR terhadap NPF (*Non Performing Financing*) berdasarkan golongan pembiayaan pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) di Indonesia, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai kurs terhadap NPF (*Non Performing Financing*) berdasarkan golongan pembiayaan pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) di Indonesia. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga BBM terhadap NPF (*Non Performing Financing*) berdasarkan golongan pembiayaan pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) di Indonesia dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap NPF (*Non Performing Financing*) berdasarkan golongan pembiayaan pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dan hasilnya adalah *Equivalent Rate* tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap NPF, CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh secara signifikan terhadap NPF, nilai Tukar (Kurs) berpengaruh secara signifikan terhadap NPF, inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap NPF dan BBM (Bahan Bakar Minyak) berpengaruh secara signifikan terhadap NPF.⁴⁷

⁴⁷ Vikki Riannasari, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPF (Non Performing Financing) Berdasarkan Golongan Pembiayaan Pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) di Indonesia (Tahun 2009-2016)*, (Yogyakarta: Skripsi, 2017) Diakses tanggal 04 November 2019 pukul 22.23

Rara Sekar Arum (2016)⁴⁸, dengan judul “Pengaruh Inflasi, *Financing to Deposite Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Panin Bank Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, BCA Syariah, dan Bank Mega Syariah. Hasil penelitian dengan uji regresi ditemukan bahwa variabel independen Inflasi dengan tingkat signifikan sebesar 0,033, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan tingkat signifikan sebesar 0,005 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun persamaan adalah pembahasan pada variabel independent inflasi (X1), FDR (X2), CAR (X3) dan variabel dependen (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada studi kasus yang digunakan. Pada penelitian Rara studi kasus yang diangkat yaitu pada Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Panin Bank Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, BCA Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2010-2015. Sedangkan penelitian yang saya lakukan studi kasus yang diangkat yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2011-2018.

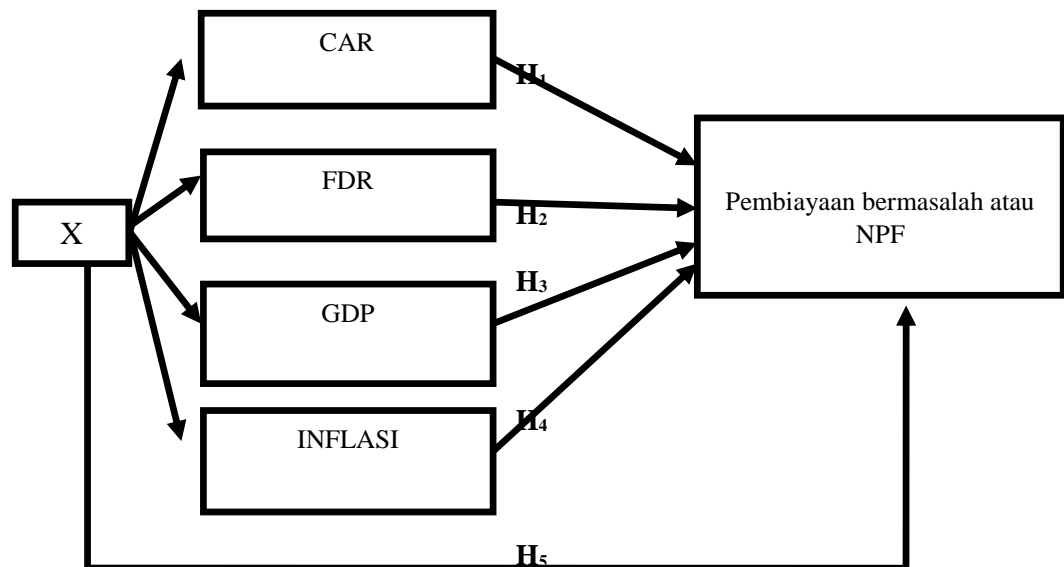
H. Kerangka Konseptual

⁴⁸ Rara Sekar Arum, *Pengaruh Inflasi, Financing to Deposite Ratio (FDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2015*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016) Diakses tanggal 12 Februari 2020 pukul 13.00 WIB

Kerangka konseptual berisi gambaran pola hubungan antar variabel yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.⁴⁹ Penelitian ini berjudul Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Syariah di Indonesia

Variabel bebas (X) dari CAR (X₁), FDR (X₂), GDP (X₃), inflasi (X₄), dan variabel terikat adalah pembiayaan bermasalah atau NPF (Y) pada BPRS di indonesiaa. Kerangka konseptual berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka konseptual



⁴⁹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 256

I. Hipotesis Penelitian

Sesuai pemikiran peneliti hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

H₂ : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

H₃ : *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

H₄ : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

H₅ : *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Gross Domestic Product* (GDP) dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.